

DAFTAR PUSTAKA

- Ardita, O. :, & Inayah, N. (2019). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BOGOR. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 4(1), 119–129. <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrakt/article/view/285>
- Darono, A. (2021). *Insentif Pajak untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi COVID-19 Berlanjut di Tahun 2021*. Kementerian Keuangan. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V6I1.6743>
- Haykal, R. A., Suhendra, M., Keuangan, P., Stan, N., Korespondensi, A., & Id, M. A. (2022). Tinjauan Pendapatan Perpajakan PPh Pasal 25/29 Pada KPP Pratama Tanjung Pinang Sebelum Dan Ketika Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 393–401. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V3I2.1694>
- Indriantoro, N. dan B. S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Karina, M. (2021). *Aturan Terbaru PPh 21 di UU HPP*. Accounting Binus. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/27/aturan-terbaru-pph-21-di-uu-hpp/>
- Lexy J, M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Masyitah, E. (2018a). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan ppn dan pajak penjualan barang mewah di indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Masyitah, E. (2018b). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DI INDONESIA*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Meidhawati, I., Andi, & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 100–122. <https://doi.org/10.35448/JMB.V12I1.6544>

- Menanda, W., Darmansyah, & Mulyadi, J. (2020). Determinan Kepatuhan dan Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 255–268. <https://doi.org/10.35838/JRAP.2020.007.02.22>
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Gede Satria Pujanggo, P. (2021). EFEK INSENTIF PERPAJAKAN BERDASARKAN DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP EKONOMI SECARA MAKRO: STUDI KASUS INDONESIA. *Scientax*, 2(2), 179–198. <https://doi.org/10.52869/ST.V2I2.91>
- Perdana, K. W. (2018). Studi Pemisahan Tugas Dan Fungsi Account Representative (Ar) Pengawasan Dan Konsultasi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 20(1). <https://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/102>
- Putra, R. J. (Rio), & Nabila, S. D. (Shiva). (2022). Pengaruh PPN (VAT) dan Payroll TAX (PPH21) terhadap Tingkat Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat, Gross Domestic Product, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1480–1487. <https://www.neliti.com/id/publications/446765/>
- Rahma, S. S. (2017). *PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN METODE E-BILLING DAN MANUAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MOJOKERTO SKRIPSI*. Skripsi UIN Malang, 31.
- Rakhmadhani, V., Ekonomi, F., Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS, S., & Phh, J. (2020). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.37577/EKONAM.V2I1.202>
- Renata, A. (2017). *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya)*.
- Rika Mawarni, Tantri Kartika Sari, & Yunita Duwi Anggiyasari. (2022). ANALISIS VARIABEL PENGARUH PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23–40. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i2.475
- Rosalina, D. (2017). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak*. PERBANAS.
- Sembring, L. J. (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk/1>
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of*

Business Administration (JBA), 1(1), 5–14.

Talondong, S., Morasa, J., Tangkuman, S. J., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Bahu, J. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2013-2017. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04), 569–577.
<https://doi.org/10.32400/GC.13.04.21451.2018>

Tansuria, B. I. (2010). *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan*. Graha Ilmu.

Yogias, T. R. (2017). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG* - [Universitas Muhammadiyah Palembang]. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/684/>

Yunita, M., & Ulfa Sentosa, S. (2019). PENGARUH PAJAK, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 533–540.
<https://doi.org/10.24036/JKEP.V1I2.6265>



LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Komparatif Antara Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Pada Tahun 2018-2021)”

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tahun 2018-2021 pada KPP ini?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kenaikan penerimaan PPh dan PPN pada KPP ini?
3. Jika terjadi kenaikan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, apakah rencana penerimaan pajak pada tahun selanjutnya akan mengalami kenaikan?
4. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun rencana penerimaan pajak?
5. Jika tidak mencapai rencana penerimaan pajak, apa saja faktor penghambatnya?
6. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya pada KPP ini dalam menyelesaikan hambatan tersebut?
7. Dari upaya-upaya tersebut, manakah yang berhasil meminimalisir dari permasalahan hambatan tersebut?
8. Bagaimana perkembangan jumlah wajib pajak selama tahun 2018-2021? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan setiap tahunnya?
9. Apakah sumber daya yang ada pada KPP ini sudah cukup efektif dan mumpuni dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak?
10. Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh DJP atau KPP dalam memaksimalkan penerimaan pajak terhadap keputusan forum G20? Seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investor.

LAMPIRAN 2: HASIL WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Winarko
Jabatan : Kepala Seksi Penjaminan & Kualitas Data
Tempat : KPP Pratama Jakarta Jagakarsa
Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

B. Pertanyaan & Jawaban

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tahun 2018-2021 pada KPP ini?

Jawaban:

- a) Alur penetapan target APBN sebagai berikut.
 - 1) Pada tanggal 17 Agustus tiap tahunnya, Presiden mengumumkan nota keuangan APBN kepada DPR RI, salah satunya mengumumkan mengenai penerimaan, serta target secara keseluruhan.
 - 2) Lalu dari RAPBN tersebut akan di sahkan menjadi APBN, sehingga dari APBN tersebut akan muncul target penerimaan pajak.
 - 3) Target penerimaan pajak tersebut nantinya akan di koordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) DJP di seluruh Indonesia melalui rapat pimpinan.
 - 4) Setelah terjadi rapat pimpinan Kanwil DJP se-Indonesia, masing-masing Kanwil DJP akan mendapatkan pembagian dari target penerimaan pajak secara keseluruhan.
 - 5) Setelah itu, masing-masing Kanwil akan membagikan kembali target penerimaan pajak yang telah diperoleh tadi kepada Kantor Pajak Pratama yang dinaungi masing-masing Kanwil DJP.
 - b) Secara keseluruhan, target penerimaan APBN selalu mengalami peningkatan, hal tersebut didasari oleh kemampuan negara untuk terus meningkatkan pembangunan.
 - c) 70% dari penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak.
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kenaikan penerimaan PPh dan PPN pada KPP ini?
 3. Jika terjadi kenaikan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, apakah rencana penerimaan pajak pada tahun selanjutnya akan mengalami kenaikan?

Jawaban:

Benar, terjadi kenaikan. Hal tersebut didasari oleh tingkat inflasi serta

proses peningkatan pembangunan negara yang harus maksimal dan berlanjut.

4. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun rencana penerimaan pajak?

Jawaban:

- a) Menggunakan monografi fiscal. Monografi fiscal merupakan laporan tentang aspek potensi perpajakan yang ada dalam wilayah kantor pajak dan dibuat oleh KPP setahun sekali. Monografi fiscal disusun dengan harapan akan memberikan gambaran umum tentang keadaan suatu wilayah dan antar wilayah yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kemungkinan yang mempengaruhinya. Selain itu juga, Seksi pelayanan juga ikut melakukan visit/kunjungan untuk memperdalam informasi ke pusat ekonomi dan bisnis di wilayahnya. Contohnya di KPP Pratama Jagakarsa, potensi kekuatan ekonomi yang baik ada di Wilayah Tanjung Barat.
- b) Melalui hal tersebut, KPP juga ikut andil dalam memberikan usulan terkait target penerimaan pajak yang ada di wilayahnya.

5. Jika tidak mencapai rencana penerimaan pajak, apa saja faktor penghambatnya?

Jawaban:

- a) Faktor utama ialah faktor ekonomi. Jika melihat data terakit jumlah wajib pajak yang ada di KPP Pratama Jagakarsa, yang paling banyak ialah jumlah dari wajib pajak orang pribadi. Pak Winarko menjelaskan melalui penggambaran seperti “Iya kan semisal kita memaksa orang untuk membayar pajak, tetapi mereka tidak memiliki uang, bagaimana ya?” “Semisal usaha mereka sedang lesu atau rugi, tidak mungkin mereka mau membayar pajak. Karena pajak kan tercipta kalau mereka mendapatkan keuntungan atau laba.”
- b) Faktor social-politik. Faktor social-politik menjadi hal yang berpengaruh, karena jika social-politik yang ada di masyarakat terganggu, otomatis pergerakan ekonomi juga akan tergan ggu. Seperti contohnya jika terjadi Tawuran atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk Vaksin Covid-19, Hal tersebut akan membuat masyarakat cemas dan mengurungkan niat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, Sehingga hal tersebut akan membuat penurunan ekonomi dan menurunkan penerimaan pajak.

6. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya pada KPP ini dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

Jawaban:

- a) Hal pertama, yaitu menstabilkan kondisi social-politik. Social-politik menjadi hal yang penting, karena jika kondisi tersebut sudah aman dan stabil, otomatis pergerakan ekonomi juga akan berjalan, dan usaha-usaha akan bergerak dengan nyaman dan terkendali.
- b) Seksi pelayanan melakukan pendekatan dengan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling krusial yang harus ditanggapi dengan serius, apalagi KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berada di Kota Besar, namun kesadaran wajib pajak masih rendah.
- c) Melakukan program kelas pajak. Program tersebut menyangkut pengisian SPT Tahunan, pengenalan peraturan terbaru atau melakukan sosialisasi
- d) Melakukan kunjungan ke Wajib Pajak. Bisa melakukan secara *offline* atau *online* (menggunakan *platform zoom* dan lain-lain). Kunjungan tersebut bisa mengenai pemberian masukan mengenai pengisian SPT WP.
- e) Melakukan penyebaran informasi melalui radio, pamphlet, atau banner. Hal tersebut berguna untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak.

7. Dari upaya-upaya tersebut, manakah yang berhasil menimalisir dari permasalahan?

Jawaban:

- a) Program kelas pajak berhasil menimalisir dari hambatan yang terjadi. Karena dengan adanya kelas pajak, akan menumbuhkan dan memberikan pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan itu sendiri.
- b) Program kunjungan wajib pajak. Melalui pendekatan secara personal, wajib pajak akan semakin leluasa untuk bertanya tentang mekanisme perpajakan dengan seksi pelayanan di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Wajib pajak juga dapat mendapatkan solusi langsung terhadap kendala yang mereka jumpai.

8. Bagaimana perkembangan jumlah wajib pajak selama tahun 2018-2021? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan setiap tahunnya?

Jawaban:

Selalu mengalami peningkatan. Karena saat ini, pemerintah menekankan untuk masyarakat memiliki NPWP. Seperti yang diketahui bahwa NPWP sangat diperlukan untuk keperluan administrasi kita disegala sector.

Semisal ini mendaftar kerja, membuat *credit card*, atau mengajukan pinjaman ke Bank, hal tersebut memerlukan NPWP sebagai bagian dari proses administrasinya.

9. Apakah sumber daya yang ada pada KPP ini sudah cukup efektif dan mumpuni dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak?

Jawaban:

- a) Sumber daya manusia belum cukup terutama pada seksi pengawasan. Hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak yang sangat banyak, namun kapasitas pegawai pada pengawasan yang masih tergolong sangat sedikit. Dicontohkan kembali bahwa setiap 1 *Account Representative* (AR) harus mengatur/*handle* ribuan wajib pajak.
 - b) Dari segi pendidikan pegawai sudah cukup baik.
 - c) Walaupun KPP Pratama Jakarta Jagakarsa masih tergolong unit vertical yang baru, namun tidak terlalu banyak masalah yang di hadapi. Masalah yang dihadapi meliputi:
 - 1) Sumber daya manusia atau pegawai yang kurang
 - 2) Fasilitas atau prasarana yang masih harus berbagi dengan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
 - 3) Tidak memiliki Aula pertemuan dan AC yang kurang mumpuni untuk kenyamanan dalam berkerja.
10. Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh DJP atau KPP dalam memaksimalkan penerimaan pajak terhadap keputusan forum G20? Seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investor.

Jawaban:

- a) Forum G-20 mungkin tidak berdampak pada tahun 2020, namun mungkin saja akan berdampak di Tahun 2023.
- b) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja ini, akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Contohnya jika tenaga kerja banyak terserap, otomatis penerimaan PPh Pasal 21 akan meningkat, jika perusahaan melakukan usaha sewa alat, ini akan berdampak terhadap penerimaan pada PPh pasal 23.

A. Identitas Narasumber

Nama : Herry Prasetyo dan Muhammad Mustofa Ridwan

Jabatan : *Account Representative* (AR)

Tempat : KPP Pratama Jakarta Cilandak

Tanggal : Selasa, 16 Desember 2022

B. Pertanyaan & Jawaban

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tahun 2018-2021 pada KPP ini?

Jawaban:

Secara umum, perkembangan pajak masih berkembang secara fluktuatif. Hal tersebut didasari oleh pandemic *covid-19*.

2. Apa saja faktor yang menyebabkan kenaikan penerimaan PPh dan PPN pada KPP ini?

Jawaban:

- a) Faktor ekonomi. Peningkatan harga komoditas dan konsumsi masyarakat itu sendiri.
- b) Peningkatan harga minyak dan batu bara.

3. Jika terjadi kenaikan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, apakah rencana penerimaan pajak pada tahun selanjutnya akan mengalami kenaikan?

Jawaban:

- a) Secara umum, perencanaan pasti akan naik. Hal tersebut akan diatur oleh kantor pusat atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- b) Target penerimaan pajak bisa turun, karena semisal proyeksi perekonomian juga ikut turun seperti kasus pandemic *covid-19*

4. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun rencana penerimaan pajak?

Jawaban:

- a) Faktor ekonomi, inflasi, nilai tukar.
- b) Monografi fiscal

5. Jika tidak mencapai rencana penerimaan pajak, apa saja faktor penghambatnya?

Jawaban:

Faktor pandemic sangat berpengaruh, seperti daya beli dari masyarakat menurun, penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap dengan maksimal dan banyak terjadi PHK massal

6. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya pada KPP ini dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

Jawaban:

Memperluas basis data. Seperti saat pandemic, aktivitas masyarakat sangat dibatasi, sehingga dari KPP Cilandak sendiri meriset hal-hal yang sedang tren atau viral. Salah satu contohnya penggunaan media online yang sangat booming, seperti *youtuber*, *selebgram*, *marketplace* (*shopee*, *tokopedia*, dan lain-lain)

7. Dari upaya-upaya tersebut, manakah yang berhasil meminimalisir dari permasalahan hambatan tersebut?

Jawaban:

Selama ini upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cilandak sudah cukup efektif dan meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Jika salah satu sector pajak belum memumpuni, maka sector lain dapat menutupi hal tersebut.

8. Bagaimana perkembangan jumlah wajib pajak selama tahun 2018-2021? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan setiap tahunnya?

Jawaban:

Secara umum jumlah wajib pajak selalu naik. Jumlah paling besar diberikan oleh Wajib Pajak OP. Hal tersebut disebabkan karena NPWP digunakan sebagai syarat administrative pada setiap bagian di aktivitas sehari-hari. Seperti untuk melamar kerja, pinjaman bank, dan lain-lain.

9. Apakah sumber daya yang ada pada KPP ini sudah cukup efektif dan mumpuni dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak?

Jawaban:

Sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak sejauh ini sudah cukup baik dan efektif. Setiap pegawai yang ada pada KPP Pratama Jakarta Cilandak diberikan kompetensi seperti Bimbingan Teknis/*In House Training* pada setiap peraturan-peraturan perpajakan, program, aplikasi terbaru.

10. Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh DJP atau KPP dalam memaksimalkan penerimaan pajak terhadap keputusan forum G20? Seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investor.

Jawaban:

Tidak ada langkah khusus yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cilandak, hanya saja KPP Pratama Jakarta Cilandak tinggal menunggu peraturan atau arahan resmi dari kantor pusat atau Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN 3: DATA PENERIMAAN KPP PRATAMA JAKARTA
CILANDAK

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Jumlah Wajib Pajak
2018	Total Pajak Penghasilan			109.809 WP
	PPh Pasal 21	362.166.494.793	468.194.414.000	
	PPh Pasal 22	200.124.005.298	102.528.283.000	
	PPh Pasal 23	134.294.345.093	181.493.219.000	
	PPh Pasal 25	249.925.387.532	498.481.112.000	
	PPh Pasal 26	47.411.178.501	82.525.836.000	
	PPh Pasal 4 Ayat (2)	334.485.373.483	521.652.716.000	
	Total PPN & PPnBM			
	PPnBM	28.237.269.957	1.505.233.000	
	PPN			
2019	Total Pajak Penghasilan			117.904 WP
	PPh Pasal 21	464.568.869.128	766.814.370.000	
	PPh Pasal 22	258.297.438.430	92.000.085.000	
	PPh Pasal 23	173.921.982.309	241.700.576.000	
	PPh Pasal 25	341.123.174.954	93.687.585.000	
	PPh Pasal 26	63.673.287.752	84.980.862.000	
	PPh Pasal 4 Ayat (2)	382.934.307.063	600.118.508.000	
	Total PPN & PPnBM			
	PPnBM	91.279.767.401	1.506.671.000	
	PPN			
2020	Total Pajak Penghasilan			123.213 WP
	PPh Pasal 21	537.446.014.198	635.955.233.000	
	PPh Pasal 22	185.696.484.789	73.486.709.000	
	PPh Pasal 23	225.079.374.110	193.062.648.000	
	PPh Pasal 25	443.730.859.001	102.132.393.000	
	PPh Pasal 26	79.510.714.972	67.879.980.000	
	PPh Pasal 4 Ayat (2)	335.869.162.169	479.355.366.000	
	Total PPN & PPnBM			
	PPnBM	30.270.827.057	1.047.280.000	
	PPN			
2021	Total Pajak Penghasilan			128.033 WP
	PPh Pasal 21	460.687.443.422	289.896.959.000	
	PPh Pasal 22	88.729.199.173	62.862.031.000	
	PPh Pasal 23	159.142.128.499	159.653.110.000	
	PPh Pasal 25	282.746.180.029	37.789.494.000	
	PPh Pasal 26	61.615.501.216	55.952.703.000	
	PPh Pasal 4 Ayat (2)	348.117.189.201	236.783.313.000	
	Total PPN & PPnBM			
	PPnBM	12.311.555.325	503.289.000	
	PPN			

LAMPIRAN 4: SURAT PERSETUJUAN IZIN RISET



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON 021-5262880, 021-5261609 EXT. 52351; FAKSIMILE 021-5266042; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-184/RISET/MPJ.30/2022 Jakarta Selatan, 25 November 2022
Sifat : Biasa
Hal : Peretujuan Izin Riset

Yth Imam Afriansyah
Jalan Aki Balak Rt. 01, Tarakan, Kalimantan Utara

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 08194-2022 pada 7 November 2022, dengan informasi:

NIM : 193403516092
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Judul Riset : Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) Selama Tahun 2017-2021 Pada Kantor Pelayanan Pratama Jagakarsa
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

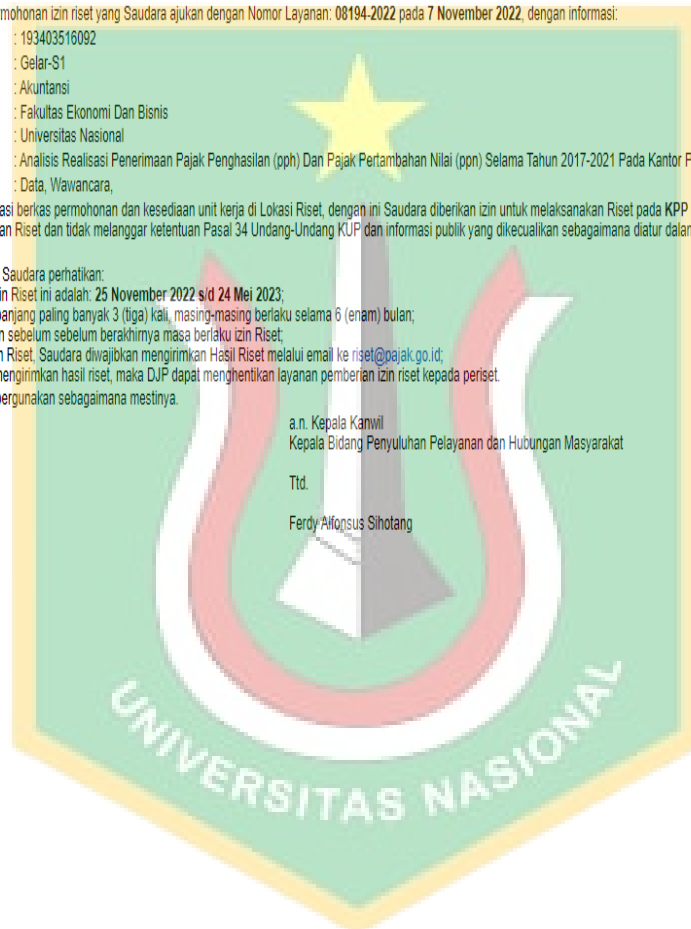
- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 25 November 2022 s/d 24 Mei 2023;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Ferdy Afopsus Sihotang



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

LAMPIRAN 5: DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 6.1 Dokumentasi wawancara dengan Kepala Seksi Penjaminan & Kualitas data, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa



LAMPIRAN 6: SURAT KONSULTASI BIMBINGAN



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1- Manajemen, S1- Akuntansi, dan S1- Pariwisata

Jl. Sawo Manis No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719

P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id> E-mail : febun49@gmail.com

KONSULTASI BIMBINGAN

Npm : 193403516092
Nama : IMAM AFRIANSYAH
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi :

KONSULTASI PEMBIMBING PROPOSAL

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
9 November, 2022	bimbingan perihal bab 1.	Sudah Ditanggapi
14 November, 2022	bimbingan perihal revisi bab 1 dan bab 2	Sudah Ditanggapi
17 November, 2022	assalamuaikum, pak. berikut saya serahkan file bab 3 saya sebagai berikut. mohon untuk dikoreksi yaa pak. terima kasih, pak.	Sudah Ditanggapi
18 November, 2022	berikut saya serahkan file final bab 1-3, yaa, pak. terima kasih, pak.	Sudah Ditanggapi

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
23 December, 2022	saya ingin menyeraikan file bab 1-3 revisi setelah sidang sempro ya pak, sebagai berikut. terima kasih, pak.	Sudah Ditanggapi
6 January, 2023	bimbingan perihal bab iv	Sudah Ditanggapi
21 January, 2023	revisi bab 4 dan tambahan mengenai efektivitas	Sudah Ditanggapi
1 February, 2023	berikut saya berikan sambungan untuk bab 4 & 5. mohon untuk dikoreksiyaa pak. terima kasih, pak.	Sudah Ditanggapi
5 February, 2023	hasil revisi bab 1-5	Sudah Ditanggapi
7 February, 2023	berikut hasil penambahan terkait gambar 4.1 dan 4.2. terima kasih, pak.	Belum Ditanggapi

LAMPIRAN 7: HASIL PENGECEKAN TURNITIN

Skripsi-Imam Afriansyah.TA

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	1%
2	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography Off

